

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para pendiri bangsa Indonesia telah mengamanahkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan pada amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Maka dari itu pemerintah mengembangkan suatu program untuk menunjang pendidikan di Indonesia berupa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program bantuan operasional sekolah ini merupakan salah satu dari empat program besar pemerintah pada tahun 2005 yaitu Program Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak. Program tersebut bertujuan untuk mengalokasikan anggaran pemerintah dalam membiayai program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan program pendidikan yang berupa pendanaan operasi nonpersonalia sekolah yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pendanaan pendidikan ini juga dapat bersumber dari peserta didik (orang tua/ wali murid), masyarakat/dunia usaha, hibah yang diberikan kepada sekolah, dan swadana.

Awalnya pemerintah mengembangkan program bantuan operasional sekolah tersebut untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun (9 tahun) meliputi

jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, setelah itu pemerintah melakukan perluasan untuk program wajib belajar sembilan tahun tersebut dengan nama Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bertujuan untuk pendanaan hingga jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Perluasan program belajar oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa/ I SMP/ sederajat di Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Penerapan bantuan operasional sekolah pada SMA/ sederajat menerapkan keadilan kepada semua lapisan masyarakat untuk mencapai pendidikan yang terjangkau dan meningkatkan kualitas sekolah yang bermutu. Sehingga beberapa sekolah yang sebelumnya tergolong Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang menjadi acuan utama pemerintah dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas itu dicabut title RSBI nya karna pemerintah ingin menerapkan kepada semua SMA/ sederajat baik RSBI maupun tidak untuk menciptakan sekolah yang berkualitas tinggi dan pendidikan yang bermutu.

Pendidikan yang bermutu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghasilkan siswa/ I di tingkat sekolah SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yang cerdas dan kompetitif. Agar dapat mencapai upaya tersebut pemerintah memberikan alokasi yang cukup besar dalam program bantuan operasional sekolah (BOS) secara berkelanjutan yang dapat digunakan mulai dari pengembangan sarana dan prasana, lingkungan yang kondusif, peningkatan profesi guru yang berkualitas, pendanaan pendidikan terkait serta meningkatkan kesadaran

semua golongan yang terkait agar dapat bekerjasama untuk menciptakan pendidikan yang bermutu serta pentingnya peningkatan kesadaran pendidikan yang lebih baik.

Peningkatan kesadaran pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mengurangi rendahnya angka pendidikan yang terjadi. Seperti kita ketahui masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan karna beberapa faktor yang terjadi seperti rendahnya keadaan ekonomi orang tua, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan yang terjadi, pemerataan pendanaan pendidikan yang masih rendah, dan lainnya.

Pendanaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemerintah memberikan pendanaan pendidikan dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut untuk meringankan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua maupun sekolah yang terkait. Pada sudut pandang orang tua dapat meringankan dalam segi pembayaran SPP, sedangkan pada sudut pandang sekolah baik yang dikelola pemerintah maupun swasta dapat meringankan biaya untuk penyediaan alat, bahan serta tenaga yang terkait.

Sesuai dengan program pemerintah terhadap perluasan program wajib belajar menjadi 12 tahun tersebut didukung oleh Rencana Strategi Kemenbud 2010-2014 : 3 yang menjabarkan bahwa pemberian Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM) selain difokuskan pada peningkatan layanan peserta didik, juga meningkatkan daya tampung pendidikan menengah melalui pembangunan, penyediaan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi ruang sekolah, penyediaan dan peningkatan kualitas guru dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maupun Perguruan Tinggi (PT) agar dapat

menyediakan guru yang produktif dan membantu dalam pengusulan pengangkatan guru sekolah menengah (SMA/ sederajat).

Besaran dana BOS SMA yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap sekolah itu berdasarkan jumlah siswa/I di masing-masing sekolah dan pemberian dapat berdasarkan satuan dana BOS SMA. Penyaluran dana BOS SMA ini diberikan setiap semester ke masing-masing sekolah, setelah penyaluran dana tersebut diharapkan pengelolaan dana BOS SMA wajib berpedoman pada petunjuk teknis BOS SMA yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Petunjuk teknis tersebut diharapkan dapat mencapai tuntutan dalam pengelolaan dana BOS SMA yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi maksudnya dalam penggunaan dana yang telah didapatkan digunakan sebaiknya-sebaiknya dengan mencapai sasaran masing-masing sekolah berdasarkan kebutuhan. Efektivitas maksudnya mengevaluasi penggunaan dana berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan.

Adanya tuntutan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan keterbatasan dana yang tersedia. Penggunaan dana BOS SMA tersebut haruslah dicatat dan dikelola dengan baik, karena pembiayaan pendidikan yang dikelola dengan baik dapat lebih mengoptimalkan layanan kepada masyarakat (konsumen pendidikan). Konsumen pendidikan yang dimaksud dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu konsumen internal (siswa, guru, staf sekolah, serta karyawan sekolah yang terlibat) dan konsumen eksternal (orang tua/ wali murid, masyarakat serta pemerintah).

Erwantosi (2010) mengatakan bahwa penggunaan dana BOS SMA harus berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari pemerintah pusat/pemerintah daerah dan sumber lainnya.

Penggunaan dana bos SMA yang menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dalam memenuhi kebutuhan sekolah penggunaan dana BOS hanya untuk kepentingan peningkatan pelayanan pendidikan agar dapat mencapai peningkatan mutu sekolah, tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Setelah menjalankan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program masing-masing sekolah memiliki tanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS pada tahun berjalan yang akan diterima oleh masing-masing pemerintah daerah setempat. Laporan penggunaan dana BOS yang disiapkan dibuat per triwulan dan dalam Rekap Penggunaan Dana BOS di akhir tahun.

Berdasarkan tujuan pemberian dana BOS yaitu peningkatan mutu sekolah dapat dilihat berdasarkan akreditasi yang dimiliki masing-masing sekolah. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008) Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, satuan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Penentuan akreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/

Madrasah yang merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan suatu pendidikan jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah jalur berformal yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Efektivitas pengelolaan dana BOS dapat dilihat berdasarkan pengelompokan sekolah per akreditasi, perbedaan akreditasi yang dimiliki dapat menjadi acuan apakah akreditasi yang dimiliki ada pengaruhnya dengan penggunaan dana BOS tersebut terkhususnya peneliti akan melihat perbandingan penggunaan Dana BOS SMA dan SMK di 6 kabupaten Sumatera Barat (studi kasus : Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solok Selatan). Di 6 kabupaten tersebut terdapat 95 (sembilan puluh lima) SMA Negeri dan 10 (sepuluh) SMA Swasta yang diantaranya 14 (empat belas) SMA Negeri dan 2 (dua) SMA Swasta di kabupaten Dharmasraya, 19 (sembilan belas) SMA Negeri dan 3 (tiga) SMA Swasta di kabupaten Solok, 15 (lima belas) SMA Negeri dan 4 (empat) SMA Swasta di kabupaten Tanah Datar, 22 (dua puluh dua) SMA Negeri di kabupaten Pesisir Selatan, 13 (tiga belas) SMA Negeri dan 1 (satu) SMA Swasta di kabupaten Sijunjung, dan 11 (sebelas) SMA Negeri di kabupaten Solok Selatan. Untuk SMK di 6 kabupaten Sumatera Barat ada 41 (empat puluh satu) SMK Negeri dan 19 (sembilan belas) SMK Swasta yang diantaranya 7 (tujuh) SMK Negeri di kabupaten Dharmasraya, 9 (sembilan) SMK Negeri dan 4 (empat) SMK Swasta di kabupaten Solok, 5 (lima) SMK Negeri dan 3 (tiga) SMK Swasta di kabupaten Tanah Datar, 8 (delapan) SMK Negeri dan 8 (delapan) SMK Swasta di kabupaten Pesisir Selatan, 7 (tujuh) SMK Negeri dan 3 (tiga) SMK Swasta di kabupaten Sijunjung, 5 (lima) SMK

Negeri dan 1 (satu) SMK Swasta di kabupaten Solok Selatan. Masing-masing SMA dan SMK di 6 kabupaten Sumatera Barat ini akan berbeda dalam pengelolaan Dana BOS nya, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dan SMK se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**”.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan Dana BOS harus berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditentukan oleh pemerintah, pengelolaan yang baik akan mencapai tujuan dari penggunaan Dana BOS itu sendiri. Tujuan yang utama yang ingin ditelusuri peneliti yaitu efektivitas dari pengelolaan dana tersebut. Melalui penelitian ini akan diketahui :

- i. Bagaimana perbandingan dana BOS yang disalurkan dengan dana BOS yang digunakan SMA dan SMK yang terakreditasi maupun belum terakreditasi di 6 Kabupaten Sumatera Barat?
- ii. Bagaimana trend penggunaan dana BOS SMA dan SMK yang terakreditasi maupun belum terakreditasi di 6 Kabupaten Sumatera Barat?
- iii. Bagaimana hubungan trend penggunaan dana BOS pada SMA dan SMK di 6 Kabupaten Sumatera Barat dengan akreditasi yang dimiliki masing-masing sekolah?
- iv. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan dana BOS dan perbandingannya pada SMA dan SMK yang terakreditasi maupun belum terakreditasi di 6 Kabupaten Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- i. Untuk mengetahui perbandingan dana BOS yang disalurkan dengan dana BOS yang digunakan SMA dan SMK yang terakreditasi maupun belum terakreditasi di 6 Kabupaten Sumatera Barat.
- ii. Untuk mengetahui trend penggunaan dana BOS SMA dan SMK yang terakreditasi maupun belum terakreditasi di 6 Kabupaten Sumatera Barat.
- iii. Untuk mengetahui hubungan trend penggunaan Dana BOS pada SMA dan SMK di 6 kabupaten Sumatera Barat dengan akreditasi yang dimiliki masing-masing sekolah.
- iv. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dana BOS dan perbandingannya pada SMA dan SMK yang terakreditasi maupun belum terakreditasi di 6 Kabupaten Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

- i. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya pada kajian yang sama.
 - b) Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut tentang pengelolaan dana BOS.

ii. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Diharapkan agar peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah serta penerapan ilmu selama kuliah.

b) Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan atas pengelolaan dan juga petunjuk teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS.

c) Bagi pihak sekolah penerima Dana BOS

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga lebih baik lagi dalam Pengelolaan Dana BOS.

d) Bagi orang tua dan masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah Pengelolaan Dana BOS sudah efektif atau belum.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan daerah penelitian. Pada penelitian ini, hanya dilakukan pada 6 (enam) Kabupaten di Sumatera Barat yang diantaranya yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solok Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian, sistematika penulisan pada skripsi ini adalah :

BAB I Pendahuluan: Bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Bab yang menjelaskan mengenai kajian teoritis, kerangka pemikiran, anggapan dasar, peraturan yang terkait yang merupakan inti dari landasan teori. Setelah kajian teoritis peneliti menjabarkan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan desain dari penelitian yang dilakukan, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini menguraikan gambaran umum dan hasil pengolahan data dari objek penelitian. Sekaligus analisis hasil dari pembahasan data tersebut.

BAB V Penutup: Bab ini berisi ringkasan kesimpulan dari hasil penelitian dan memuat kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang dijelaskan pada bab empat.

